

Judul : RUU Keuangan Haji, jumlah Dewas BPKH jangan lebih direksi
Tanggal : Jumat, 20 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

RUU Keuangan Haji Jumlah Dewas BPKH Jangan Lebih Direksi



Bob Hasan

JUMLAH Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) jadi salah satu poin krusial dalam pembahasan RUU Pengelolaan Keuangan Haji (PKH). Jumlah Dewas jadi salah satu kunci agar pelaksanaan pengelolaan dana haji tidak menimbulkan persoalan di belakang.

"Karena itu, usulan penambahan Dewas harus didasarkan pada keputusan yang kuat. Namun tiap Dewas harus memiliki fungsi yang benar-benar bermanfaat," ujar Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Bob Hasan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Bob menekankan, prinsip kehati-hatian harus menjadi pedoman utama dalam pengelolaan dana haji, mengingat dana itu merupakan amanah jutaan calon jemaah haji Indonesia. Harus ada peningkatan kapasitas SDM di lembaga pengelola agar memiliki kompetensi yang memadai di bidang investasi syariah dan manajemen risiko. "Sehingga pengelolaan dana haji bisa berjalan profesional, transparan, dan akuntabel," tegasnya.

Anggota Baleg Jazuli Juwaini menambahkan, jumlah Dewas sebaiknya tidak melampaui jumlah direksi

agar tetap proporsional dan mencerminkan tata kelola yang sehat. Komposisi yang berlebihan berpotensi memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat, terlebih karena dana yang dikelola bersumber langsung dari para jemaah haji.

Politikus PKS itu merekomendasikan jumlah Dewas maksimal tujuh orang, agar struktur kelembagaan tetap efisien dan tidak membebani anggaran. Karena beban kerja direksi jauh lebih besar dibandingkan pengawas, komposisi harus disusun secara proporsional, rasional, dan berorientasi pada efektivitas kinerja lembaga.

"Pembahasan RUU PKH masih akan terus berlanjut guna menumuskan tata kelola keuangan haji yang dinilai transparan, profesional, dan akuntabel," katanya.

Sejalan dengan itu, anggota Baleg Saleh Partaonon Daulay menyatakan, penambahan jumlah Dewas tidak jadi persoalan selama fungsi dan kewenangannya diperjelas secara tegas. Pihaknya setuju jumlah anggota diperbanyak dan mengusulkan jumlahnya ganjil, agar mekanisme pengambilan keputusan berjalan lebih demokratis.

"Nanti delapan anggota tambah satu ketua, jadi sembilan. Urusan seperti ini tidak boleh jumlahnya genap, melainkan harus ganjil karena kan kita demokrasi," katanya.

Saleh lalu menyoroti kewenangan Dewas yang justru berpotensi menghambat kinerja lembaga itu. Kondisi tersebut perlu segera diluruskan, terutama karena BPKH merupakan lembaga yang mengelola keuangan dalam skala besar. Penataan ulang kewenangan Dewas harus dilakukan agar tidak tumpang tindih dengan fungsi eksekutif. ■ PYB